



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL  
TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*MEMORANDUM  
OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN  
ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*);

c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,  
Asisten Deputi Bidang Hukum dan  
Pengembangan Undang-undangan,



Setiawati



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL  
TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*MEMORANDUM  
OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN  
ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Materi muatan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Bidang kerja sama, meliputi:
  - a. pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata;
  - b. pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer, dan bidang lainnya yang disepakati bersama;
  - c. pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga angkatan bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja sama dalam bidang:
    - 1) operasi pemeliharaan perdamaian;
    - 2) bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;
    - 3) operasi pencarian dan penyelamatan;
    - 4) manajemen krisis;
    - 5) komando, kendali, komunikasi, dan sistem informasi;
    - 6) pendidikan, pelatihan, dan latihan; dan
    - 7) kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
  - d. dukungan peran serta personel angkatan bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat;
  - e. peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;
  - f. pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama.
2. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual.
3. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dari setiap Pihak.
4. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman dilakukan secara damai melalui perundingan antara Para Pihak. Jika tidak dapat terselesaikan, masalah akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

II. Pasal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6300



REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL

TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

**Mempertimbangkan** pentingnya memajukan kerja sama pertahanan dalam hubungan bilateral antara kedua negara dan pentingnya kerja sama tersebut dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;

**Mengakui** adanya kebutuhan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama teknik yang telah terjalin antara kedua negara yang didasarkan pada penghormatan penuh atas hak kedaulatan dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menguntungkan;

**Meneguhkan** kembali komitmen internasional kedua negara terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang telah diakui secara umum; dan

**Sesuai** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**A. TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk kerangka kerja guna meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang hubungan pertahanan dan militer antara Para Pihak dalam lingkup yang menjadi kepentingan bersama berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, saling percaya dan keuntungan bersama.

## B. BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini akan mencakup:

1. Pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata.
2. Pertukaran informasi atau praktek-praktek terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer dan bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama.
3. Pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata kedua negara, dan pengembangan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:
  - a. Operasi pemeliharaan perdamaian;
  - b. Bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana;
  - c. Operasi pencarian dan penyelamatan;
  - d. Manajemen krisis;
  - e. Komando, kendali, komunikasi dan sistem informasi;
  - f. Pendidikan, pelatihan dan latihan;
  - g. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama.
4. Dukungan peran serta personil Angkatan Bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat.
5. Peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan melalui:
  - a. Pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, kunjungan, pertukaran personel dan proyek bersama;
  - b. Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksi teknologi dari persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan darat, laut, dan udara.
6. Pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan, yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini Para Pihak secara bersama-sama akan menyusun dan menentukan program kerja sama tahunan.

Pengaturan untuk kunjungan resmi oleh para Menteri dan pejabat tinggi akan ditentukan secara terpisah dari program tahunan ini.

#### **C. INFORMASI RAHASIA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara masing-masing Para Pihak wajib memberikan perlindungan yang tepat terhadap Informasi Rahasia, pengungkapan dan penyampaian informasi dan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya secara sah, yang dipertukarkan atau dihasilkan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini. Hal-hal yang menyangkut perlindungan dan distribusi informasi dan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan hak-hak yang sah dari pihak ketiga, dengan mempertimbangkan penuh pembagian kepemilikan secara adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, diatur oleh perjanjian yang dibuat oleh organisasi-organisasi dari Para Pihak pada bidang-bidang kerja sama tertentu.

#### **D. KETENTUAN AKHIR**

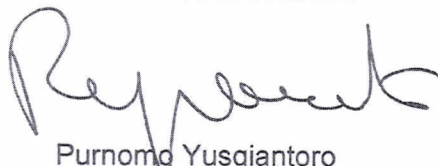
1. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing Pihak, diperuntukkan atau disediakan untuk tujuan tersebut, dan tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing Pihak.
2. Para Pihak dapat bersama-sama menyepakati pengaturan terpisah secara tertulis untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama tertentu sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai, melalui perundingan antara Para Pihak, atau dalam hal masalah tersebut tidak dapat terselesaikan oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diubah secara tertulis melalui persetujuan bersama Para Pihak. Setiap perubahan dimaksud dinyatakan berlaku pada tanggal yang disetujui Para Pihak.

5. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik di mana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Nota Kesepahaman ini.
6. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
7. Masing-masing Pihak setiap saat dapat mengundurkan diri dari Nota Kesepahaman ini, namun harus menyampaikannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum penghentian keikutsertaannya dalam Nota Kesepahaman ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

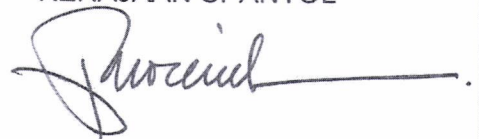
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013, dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Inggris, Spanyol dan Indonesia, semua naskah berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, Para Pihak akan merujuk pada naskah bahasa Inggris.

UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA



Purnomo Yusgiantoro  
Menteri Pertahanan

UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN  
KERAJAAN SPANYOL



Pedro Morenés Eulate  
Menteri Pertahanan



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO  
ENTRE  
EL MINISTERIO DE DEFENSA DE  
LA REPÚBLICA DE INDONESIA  
Y  
EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL  
REINO DE ESPAÑA  
SOBRE  
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN  
EN EL CAMPO DE LA DEFENSA**

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO**  
**ENTRE**  
**EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA**  
**Y**  
**EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA**  
**SOBRE**  
**ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA DEFENSA**

El Ministerio de Defensa de la República de Indonesia y el Ministerio de Defensa del Reino de España, denominadas en lo sucesivo los "Participantes";

**Considerando** la importancia de promover la cooperación de defensa en las relaciones bilaterales entre los dos países y de su importancia para el mantenimiento de la paz y la seguridad;

**Reconociendo** la necesidad de fortalecer las existentes relaciones de amistad y cooperación técnica entre los dos países basada en el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial y los principios de igualdad, la no interferencia en los asuntos internos y de beneficio mutuo;

**Reafirmando** sus compromisos internacionales a los principios generalmente reconocidos y las normas del derecho internacional; y

**Conforme** a las leyes vigentes y los reglamentos en los respectivos países.

Han alcanzado los siguientes acuerdos:

**A. OBJETIVO**

Este Memorando de Entendimiento (MOU) es para proporcionar un marco para mejorar las actividades de cooperación en materia de defensa y las relaciones militares entre los participantes en áreas de interés mutuo, basado en los principios de respeto mutuo, confianza y beneficio mutuo.

**B. ÁREAS DE COOPERACIÓN**

Las áreas de cooperación en este MOU incluirán:

1. Intercambio de visitas de funcionarios a nivel de Ministerios, incluyendo las fuerzas de defensa.
2. Intercambio de información o de mejores prácticas en áreas como la política de defensa, educación y capacitación, asistencia médica, legislación militar, servicios militares y otras áreas mutuamente acordadas.
3. Fomentar los contactos entre las instituciones de las fuerzas armadas de ambos países y desarrollar la cooperación en los ámbitos siguientes:
  - a. Operaciones de mantenimiento de la paz;
  - b. Asistencia humanitaria y atenuación de desastres;
  - c. Operaciones de búsqueda y salvamento;
  - d. Gestión de crisis;
  - e. Mando, control, comunicaciones y sistemas de información;
  - f. Educación, formación y ejercicios;
  - g. Otras áreas mutuamente acordadas.
4. Patrocinar la participación en actividades apropiadas de personal de las fuerzas armadas de los participantes.
5. Promoción de la cooperación en defensa de ciencia y tecnología a través de:
  - a. Intercambio de información, educación y formación, visitas, intercambio de personal y proyectos conjuntos;
  - b. Investigación y Desarrollo Conjunto de nuevos equipos y armamento de defensa, equipos y armamento electrónicos, equipos especiales, así como tecnologías de diseño y producción del armamento y equipos para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
6. Desarrollar la cooperación en el área de la industria de defensa, que incluye la transferencia de tecnología, investigación, producción conjunta y comercialización conjunta.

Con el fin de aplicar las disposiciones de este acuerdo, cada año, los participantes compilarán y decidirán mutuamente sobre un programa de cooperación.

El régimen de visitas oficiales de ministros y funcionarios de alto rango se determinará al margen de este programa anual.

### **C. INFORMACIÓN CLASIFICADA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Conforme a la legislación de sus respectivos Estados, los participantes proporcionarán una protección eficaz de la información clasificada, de la divulgación y distribución de información, y de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo su propiedad y uso legal, que se transferirán o crearan de acuerdo con este MOU. Las cuestiones de protección y distribución de información y derechos de propiedad intelectual – incluyendo la protección de los legítimos derechos de terceras partes, y teniendo plenamente en cuenta la porción equitativa de la propiedad basada en la contribución de los participantes respectivos – se regularán por los acuerdos celebrados por los distintos organismos de los participantes, en áreas específicas de cooperación.

### **D. DISPOSICIONES FINALES**

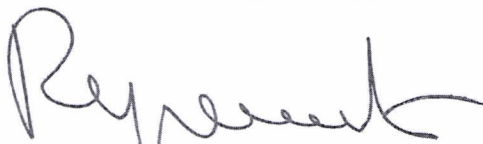
1. Cualquier actividad relacionada con este MOU estará sujeta a la disponibilidad de fondos de cada participante, – presupuestados o puestos a disposición para tales fines – así como a las leyes y reglamentos respectivos del participante.
2. Los participantes determinarán mutuamente disposiciones separadas, por escrito, para la realización de actividades específicas de cooperación en virtud de este MOU.
3. Cualquier asunto que surja sobre la interpretación de este MOU deberá resolverse amistosamente, a través de la negociación entre los participantes o, en caso de que el asunto no se resuelva por los participantes, a través de canales diplomáticos.
4. Este MOU puede ser modificado por escrito, por consentimiento mutuo de los participantes. Cualquier modificación tendrá vigencia en la fecha determinada por los participantes.

5. Este MOU entrará en vigor a la entrega de sendas Notas Diplomáticas, a través de las cuales los participantes se hayan informado mutuamente sobre la finalización de los trámites establecidos por su legislación interna para la entrada en vigor de este MOU.
6. Este MOU permanecerá en vigor por un período de 5 (cinco) años y se prorrogará automáticamente por otros 5 (cinco) años, a menos que alguno de los participantes lo dé por finalizado mediante notificación escrita, al menos 6 (seis) meses antes de su intención de finalizar este MOU.
7. Cualquier participante puede interrumpir su participación en este MOU, en cualquier momento, pero debe esforzarse en proporcionar al otro notificación por escrito, por lo menos 90 (noventa) días antes de la prevista interrupción de su participación en este MOU.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscribientes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente MOU.

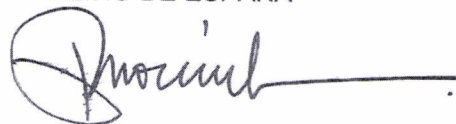
Firmado en Yakarta, el 13 de febrero de 2013, en dos ejemplares, cada uno en idioma inglés, español e indonesio, siendo todos ellos igualmente auténticos. En caso de interpretaciones divergentes, los Participantes acudirán al texto en inglés.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA  
REPÚBLICA DE INDONESIA



Purnomo Yusgiantoro  
el Ministro de Defensa

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL  
REINO DE ESPAÑA



Pedro Morenés Eulate  
el Ministro de Defensa



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**BETWEEN**

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN**

**ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as the "Participants";

**Considering** the importance of promoting defence co-operation in bilateral relations between the two countries and of its particular significance for the maintenance of international peace and security;

**Recognizing** the need to strengthen the existing friendly relations and technical co-operation between the two countries based on full respect of sovereignty and territorial integrity and the principles of equality, non interference to the internal affairs and mutual benefit;

**Reaffirming** their international commitments to the generally recognized principles and norms of the international law; and

**Pursuant** to the prevailing laws and regulations in the respective countries.

Have reached the following understandings:

**A. OBJECTIVE**

This Memorandum of Understanding (MoU) is to provide a framework for enhancing cooperative activities in the field of defence and military relations between the Participants in areas of mutual interest, based on the principles of mutual respect, trust and mutual benefit.

**B. AREAS OF COOPERATION**

The areas of cooperation in this MoU will include:

1. Exchange of visits of officials at ministry's level including defence forces.
2. Exchange of information or best practices in the areas such as defense policy, education and training, medical assistance, military legislation, military services and other mutually agreed areas.
3. Fostering contacts between the Armed Forces institutions of both countries, and developing the cooperation in the following fields:
  - a. Peacekeeping operations;
  - b. Humanitarian assistance and disaster relief;
  - c. Search and rescue operations;
  - d. Crisis management;
  - e. Command, control, communications and information systems;
  - f. Education, training and exercises;
  - g. Other mutually agreed areas.
4. Sponsoring participation of personnel of each other's Armed Forces in appropriate activities.
5. Promoting of cooperation in defence science and technology through:
  - a. Exchange of information, education & training, visits, exchange of personnel and joint projects;
  - b. Joint research and development of new defence equipment and armaments, electronic equipment and armaments, other special purpose equipment, as well as design and production technologies of the above armaments and equipment for the army, navy and air force.
6. Developing co-operation in the area of defense industry, which includes transfer of technology, joint research, joint production and joint marketing.

In order to implement the provisions of this MoU the Participants will each year compile and mutually decide upon a programme of cooperation.

The arrangements for official visits by Ministers and high ranking officials will be determined separately from this annual programme.

#### **C. CLASSIFIED INFORMATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

In accordance with the legislation of their states the Participants shall provide efficient protection of Classified Information, disclosure and distribution of information and Intellectual Property Rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in accordance with this MoU. The issues of protection and distribution of information and Intellectual Property Rights including protection of a third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Participants, shall be regulated by the agreements concluded by organizations of the Participants on specific areas of co-operation.

#### **D. FINAL PROVISIONS**

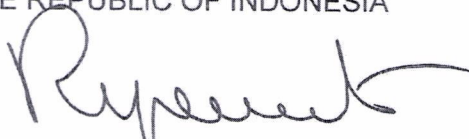
1. Any activities related to this MoU are subject to the availability of funds of each Participant, appropriated or otherwise made available for such purposes, and to the respective Participant's applicable laws and regulations.
2. The Participants may mutually determine separate arrangements in writing for the conduct of specific cooperative activities pursuant to this MoU.
3. Any matter arising from the interpretation of this MoU is to be settled amicably, through negotiation between the Participants, or in the event that the matter is not settled by the Participants, through diplomatic channels.
4. This MoU may be modified in writing by mutual consent by the Participants. Any such modification becomes operative on the date determined by the Participants.

5. This MoU will enter into force upon delivery of diplomatic notes through which the Participants have informed each other on completion of fulfillment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into force of this MoU.
6. This MoU will remain in force for a period of 5 (five) years and will automatically be extended for another 5 (five) years unless either Participant terminate it by giving written notification at least 6 (six) months prior to its intention to terminate this MoU.
7. Either Participant may discontinue its participation in this MoU at any time, but should endeavor to provide written notice to the other at least 90 (ninety) days prior to its intended discontinuation of its participation in this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed the present MoU.

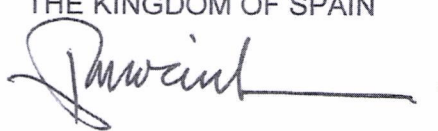
Signed at Jakarta on 13<sup>th</sup> February 2013, in two copies, each in English, Spanish and Indonesian languages, all text being equally authentic. In case of divergent interpretations, the Participants will refer to the English text.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA



Purnomo Yusgiantoro  
Minister of Defence

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF  
THE KINGDOM OF SPAIN



Pedro Morenés Eulate  
Minister of Defence

Salinan naskah resmi  
*Certified true copy*

Nomor : 0347/CTC/12/2018/52  
Number



Sulaiman  
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia  
*Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties*  
*Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia*

Tanggal : 11 Desember 2018  
Date